

Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Anggaran Dana Bantuan Pada Dinas Sosial Solok Selatan

Rahma Lara Mauhelda, Luxfia Hanifa, Rani Safitri, Dodi Suryadi
Akuntansi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Putra Indonesia "YPTK"
10rahmalara@gmail.com, luxfiahanifa@gmail.com, rs4839710@gmail.com

Abstract

Responsibility Accounting is an accounting system used by companies to evaluate the performance of responsibility centers and facilitate control over results and costs which are the responsibility of the management or head concerned. In implementing responsibility accounting there are several conditions, namely, the existence of an organizational structure, budget, separation of controlled costs and uncontrolled, classification of account codes, and responsibility accounting reports. This research aims to determine whether the application of responsibility accounting in budget control at Social Service Offices is appropriate or not. The author conducted research using a qualitative descriptive method. This method was carried out to apply responsibility accounting in cost control at the South Solok Regency Social Service Office. The data was obtained in the form of interviews and documentation files provided directly from the Social Services Office. From the results of the research, it was concluded that the implementation of accountability accounting in controlling the social assistance funds budget at the South Solok Regency Social Service Office was still not effective looking at the five indicators of accountability accounting that were carried out.

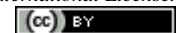
Keywords: *Responsibility Accounting, Costs*

Abstrak

Akuntansi Pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi kinerja pusat pertanggungjawaban dan memudahkan pengendalian atas hasil dan biaya yang menjadi tanggungjawab pimpinan atau kepala yang bersangkutan. Pada penerapan akuntansi pertanggungjawaban terdapat beberapa syarat-syarat yakni, adanya struktur organisasi, anggaran, pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali, pengklasifikasian kode akun, dan laporan akuntansi pertanggungjawaban. Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengendalian anggaran pada Kantor Dinas Sosial sudah sesuai atau belum. Penulis melakukan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan untuk penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengendalian biaya pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten solok Selatan. Data yang diperoleh dalam bentuk wawancara dan dokumentasi file-file yang diberikan langsung dari Kantor Dinas Sosial. Dari hasil penelitian yang disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengendalian anggaran dana bantuan sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten solok selatan masih belum efektif melihat dari lima indikator akuntansi pertanggungjawaban yang dilakukan.

Kata Kunci: Akuntansi Pertanggungjawaban, Biaya.

JUBIKO is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia Seiring Waktu Menunjukkan Perkembangan, Walaupun Belum Secepat Perkembangan Akuntansi Di Sektor Swasta. Dengan Perkembangan Ini Pemerintah Mendapatkan Tuntutan Yang Lebih Besar Dari Masyarakat Untuk Memberikan Informasi Mengenai Aktivitas

Atau Program Dan Bagaimana Kinerja Pemerintah Sebagai Wujud Dari Pertanggungjawaban. Seiring Berkembangnya Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia, Maka Wujud Pertanggungjawaban Kepada Masyarakat Atas Kinerja Pemerintah Menjadi Suatu Tuntutan Yang Umum. Menguatnya Tuntutan Tersebut

Mengharuskan Lembaga Pemerintah Memberikan Informasi Atas Aktivitas Dan Kinerja Kepada Publik. Akuntansi Sektor Publik Yang Seringdihubungkan Dengan Pemerintah Yang Bertanggungjawab Untuk Melakukan Pelayanan Public Dalam Hal Memenuhi Kesejahteraan Diberbagai Bidang Kehidupan. Pemerintah Merupakan Entitas Publik Yang Harus Mempertanggungjawabkan Kinerjanya Dalam Bentuk Laporan Keuangan. Pemerintah Berkewajiban Untuk Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Secara Tertib, Taat Pada Peraturan Perundang-Undangan, Efisien, Ekonomis, Efektif, Dan Transparan (Hariyanto, 2012:83).

Tanggungjawab Muncul Sebagai Akibat Dari Pemberian Kekuasaan Manajemen Dari Jenjang Yang Lebih Tinggi Ke Jenjang Di Bawahnya. Akuntansi Pertanggungjawaban ialah Suatu Bentuk Akuntansi Yang Digunakan Dari Sisi Manajemen Dalam Mengukur Dan Memberikan Penilaian Kinerja Manajemen Setiap Pusat Pertanggungjawaban Untuk Mempertanggungjawabkan Kinerja Manajemen Dengan Cara Mengkomparasikan Anggaran Dengan Pencapaian Rencana Anggaran (Realisasi) Pada Suatu Kurun Waktu. Akuntansi Pertanggungjawaban Umumnya Digunakan Oleh Perusahaan Dan Organisasi Publik Karena Dalam Akuntansi Ini Mengizinkan Adanya Pencatatan Aktivitas Atau Program, Menentukan Unit Terkait Yang Dibebankan Tanggungjawab Dengan Aktivitas Tersebut, Dan Menilai Unit Tersebut Efisien Atau Tidak Dalam Pelaksanaannya. Pusat Pertanggungjawaban Membantu Organisasi Dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pada Masing-Masing Pusat Pertanggungjawaban Yang Dapat Tercermin Dari Pencapaian Sasaran Setiap Pusat Pertanggungjawaban (Bhaia,2017:1).

Menurut Bastian (2010:191), Anggaran Berguna Sebagai Alat Pengendalian Suatu Kegiatan Karena Anggaran Yang Sudah Disusun Dan Disetujui Merupakan Suatu Pedoman Dari Penyusun Anggaran Dan Para Pelaksana Yang Ikut Berperan Dalam Penyusunan Anggar Tersebut. Dengan Adanya Analisis Selisih Anggaran Dapat Diketahui Penyimpangan Yang Terjadi Pada Suatu Organisasi Atau Unit-Unit Dalam Perusahaan Atau Organisasi. Oleh Karena Itu, Sangat Perlu Menerapkan Sebuah Akuntansi Pertanggungjawaban Yang Menjadi Suatu Sistem Untuk Mengendalikan Tanggungjawab Pada Tiap Bidang Kerja Atau Departemen. Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Yang Memadai Mampu Mendorong Suatu Departemen Untuk Mencapai Tujuannya. Kantor Dinas Sosial merupakan Salah Satu Kantor Pemerintahan Di Kabupaten Solok Selatan Yang Bergerak Di Bidang Sosial Yang Beralamatkan Di Jalan El Tari Maumere. Kantor Dinas Sosial Juga merupakan Salah Tempat Pelayanan Atau Penyaluran Dana Bantuan Sosial. Dana Bantuan Sosial Sendiri merupakan Pemberian Bantuan Sosial Yang Sifatnya Tidak Terus Menerus Dan Selektif Dalam Bentuk Uang Atau Barang Kepada Masyarakat Yang Bertujuan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun Beberapa Beberapa Jenis Bantuan Sosial Yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pada Kantor Dinas Sosial Telah Menerapkan Struktur Organisasi Garis Dan Staff, Dimana Setiap Atasan Mempunyai Bawahan Tertentu Dan Siap Menerima Perintah Dari Atasan

2. Metodologi Penelitian

Rancangan penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode alami. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kusioner melainkan dari observasi, wawancara langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk menjelaskan suatu fenomena.

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sugiyono (2019:25) penilaian deskriptif adalah penilaian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih yang mau dideskriptifkan untuk menghasilkan gambar yang mendalam dan terperinci mengenai Akuntansi pertanggungjawaban dengan anggaran pada Kantor Dinas Sosial. Untuk mendapatkan data mengenai akuntansi pertanggungjawaban, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya penulis mengolah data yang diperoleh dengan menganalisis sesuai dengan teori yang ada dan diberikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian tersebut.

Tinjauan Pustaka

Akuntansi Pertanggungjawaban Akuntansi pertanggungjawaban ialah sistem yang melakukan pengukuran terhadap banyak pencapaian yang ada di pada suatu pusat pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang pimpinan butuhkan dalam menjalankan pusat pertanggungjawaban (Hansen & Mowen, 2005).

Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang dikonfigurasi agar dapat disesuaikan dengan pusat pertanggungjawaban dalam pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan, selain itu bertujuan untuk seseorang dimintai

pertanggungjawaban atas penyimpanan anggaran yang terjadi (Mulyadi, 2001).

Sedangkan tujuan akuntansi pertanggungjawaban untuk mengontrol biaya dengan melakukan pengelompokan, pencatatan, merangkum, dan mengaitkan dengan penanggungjawab atas biaya dalam area tanggungjawabnya (Mulyadi, 2001).

Pengendalian Biaya

Biaya disebut dengan jumlah output yang dihasilkan dari satu unit input yang digunakan, pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi biaya yang dikeluarkan dengan biaya yang telah ditetapkan (Simamora, 2012).

Efisiensi suatu pusat biaya merupakan kemampuan untuk menggunakan biaya (input) yang lebih kecil untuk menghasilkan keluaran (output) dalam jumlah yang sama atau kemampuan dalam menggunakan biaya yang lebih besar.

Menurut Hansen & Mowen (2016) biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi.

Menurut Indriani (2018) “Pengertian biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan mata uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu, dari definisi tersebut tidak semua pengeluaran adalah biaya dan tidak semua biaya merupakan pengeluaran”.

Menurut Riwayadi (2017) berpendapat bahwa biaya adalah kos barang atau jasa yang mampu memberikan manfaat yang digunakan untuk memperoleh suatu pendapatan. Dari definisi-definisi biaya diatas dapat disimpulkan bahwa biaya merupakan suatu bentuk pengorbanan yang dapat diukur dengan satuan uang atas barang atau jasa untuk suatu tujuan tertentu. Ada beberapa unsur dalam biaya, yang meliputi (Samryn, 2012):

Hasil dan Pembahasan

Kantor Dinas Sosial membuat laporan akuntansi pertanggungjawaban satu kali dalam satu periode. Laporan tersebut dibuat oleh kabag keuangan yang nantinya akan dilaporkan kepada kepala dinas. Laporan periodik ini harus diserahkan kepada komisariss atau pengawas paling lambat satu bulan setelah berakhirnya periode laporan. Pelaporan ini menunjukan bahwa pemantuan kinerja dilakukan secara berkesinambungan terhadap setiap bidang kerja organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Namun pada sistem pelaporan akuntansi pertanggungjawaban ini masih ditemui beberapa kendala dimana sistem pengimputan yang telah

Tabel 1.Laporan Anggrab dan Realisasi pada kantor Dinas Sosial Solok Selatan tahun 2021

Keterangan	Anggran	Realisasi	%
Pendaparan	850,560,190,190	866,235,5988,985	101,84

Belanja	823,560,836,409	730,565,958,343	88,71
Tranfer	96,080,673,364,	95,571,875,630	99,47
Pembiayaan Daerah	70,005,673,546	70,005,673,546	99,90

Berikut Ini Tabel 2. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dan Realisasi Pada Kantor Dinas Sosial Solok SelatanTahun 2021

No	Uraian	Anggran	Realisasi	%
1.	Pendap atan	850,560, 190,190, 0	866,235,5 98,985,00	10 1.8 4
1.1	Pendap atan Asli Daerah	85,332,1 60,294,0 0	80,459,85 3,847,00	94, 29
1.2	Pendap atan Transfer	719,028, 134,291, 00	741,085,2 02,403,00	10 3.0 7
1.2 .1	Pendap atan Transfer Pemerin tah Pusat	608,359, 266,319, 00	632,792,0 65,983,00	10 4,0 2
1.2 .2	Pendap atan Transfer Pemerin tah Pusat Lainnya	56,256,3 06.000.0 0	56,256,30 6,000,00	10 0.0 0

1.2	Pendap	51,912,5	49,536,83	95,		an			
.3	atan	61,972,0	0,420,00	42	4.	Pembia	70,005,6	70,005,67	99,
	Transfer	0				yaan	73,546,8	3,546,89	90
	Pusat					Pemerin	9		
	Daerah					tah			
	Lainnya				4.1	Penerim	69,573,3	69,505,67	99,
1.2	Bantuan	2,500,00	2,500,000,	10		aan	19,583,0	3,546,89	90
.4	Keuang	0,000,00	000,00	0,0		Pembia	0		
	an			0		yaan			
2.	Belanja	823,552,	730,565,9	88.		Daerah			
		836,409,	58,343,95	71	4.2	Pengelu	69,073,3	69,005,67	99,
		00				aran	19,583,0	3,546,89	00
2.1	Belanja	651,490,	602,877,2	92,		Pembia	0		
	Operasi	428,465,	07,253,96	54		yan			
	onal	00				daerah			
2.2	Belanja	170,062,	127,046,9	74,	<p>Sumber Data:Laporan Anggaran Realisasi Dinas Solok Selatan 2021</p> <p>PEMBAHASAN</p> <p>Anggaran</p> <p>Anggaran secara teori diidentifikasi sebagai alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi.Berdasarkan teori akuntansi pertanggungjawaban, setiap pusat pertanggungjawaban atau bidang harus ikut serta dalam penyusunan anggaran karena anggaran merupakan gambaran rencana kerja yang akan dilaksanakan dan sebagai dasar untuk menilai suatu kinerja suatu instansi. Pada kantor dinas sosial setiap bidang pertanggungjawaban hanya melakukan perencanaan sesuai dengan data masyarakat yang membutuhkan bantuan, melakukan perekapan serta menyeleksi apakah pemohon yang bersangkutan layak dan sudah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan bantuan sosial yang kemudian akan di ajukan kepada bendahara keuangan untuk diperiksa dan diteliti kembali serta dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan anggaran yang ada. Setelahnya data tersebut di ajukan lagi ke kepala dinas untuk disetujui melalui putusan bupati yang dilampirkan melalui surat keputusan bupati. Setelah ditetapkan surat keputusan bupati,perencanaan anggaran tersebut diserahkan kembali kepada kabag keuangan untuk diproses.</p>				
	Modal	407,944,	36,090,00	71					
		00							
2.3	Belanja	2,000,00	641,815,0	32,					
	Tak	0,000,00	00,00	09					
	Terduga								
3.	Transfer	96,080,6	95,571,87	99,					
		73,364,0	5,630,00	47					
		0							
3.1	Transfer	2,150,12	1,641,329,	76,					
	bagi	7,664,00	910,00	34					
	hasil								
	pendapa								
	tan								
3.2	Transfer	93,930,5	93,930,54	10					
	Bantuan	45,700,0	5,700,00	0,0					
	Keuang	0		0					

Penggolongan Biaya

Berdasarkan Hasil Penelitian Maka Dapat Dikatakan Bahwa Kantor Dinas Kabupaten Solok Selatan Belum Menerapkan Salah Satu Syarat Akuntansi Pertanggung-Jawaban Menurut Mulyadi Dimana Dalam Hal Ini Pemisahan Biaya.Kantor Dinas Sosial Belum Memisahkan Pengklasifikasian Biaya Ini, Sehingga Tidak Diketahui Mana Yang Biaya Terkendali Dan Biaya Tidak

Terkendali Yang Menjadi Tanggung-Jawab Individu Dalam Pusat bertanggungjawab. Biaya Yang Tergolong Kedalam Biaya Terkendali Adalah Dalam Hal Ini Perlu Diadakan Klasifikasi Biaya Yang Jelas Dengan Memisahkan Biaya Yang Dapat Dikendalikan Dan Biaya Yang Tidak Dapat Dikendalikan, Sehingga Mempermudah Pimpinan Dalam Mengantisipasi Apabila Terjadi Penyimpangan. Namun Berdasarkan Aturan Pemerintahan Kantor Dinas Sosial Sudah Menerapkan Anggaran Biaya Sesuai Dengan Ketentuan Pemerintahan Dan Aturan Yang Berlaku. Berdasarkan Teori Akuntansi Pertanggungjawaban Mulyadi (2010) Dengan Penelitian Yang Telah Dilakukan Dinyatakan Bahwa Kantor Dinas Sosial Belum Sesuai Karena Belum Memenuhi Salah Satu Syarat Akuntansi Pertanggungjawaban Yaitu Pemisahan Biaya Yang Dapat Dikendalikan Dan Biaya Yang Tidak Dapat Dikendalikan.

Hasil Penelitian Yang Dilakukan Sejalan Dengan Penelitian Sebelumnya Oleh Sulastri (2019) Dengan Judul Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Anggaran Dana Bantuan Pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Solok Selatan Yang Menjelaskan Bahwa Kantor Dinas Sosial Belum Melakukannya Pemisahan Biaya Terkendali Dan Tidak Terkendali Karena Pada Kantor Dinas Sosial Lebih Meenfokuskan Kepada Biaya- Biaya Yang Dapat Dikendalikan Saja

Pengklasifikasian Kode Akun

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Kantor Dinas Sosial Kabupaten Solok selatan telah melakukan pengklasifikasian kode akun. Pengklasifikasian kode akun yang digunakan dalam kantor dinas sosial sendiri ada tiga sampai empat sub digit dimana sub digit pertama merupakan sub bagian kode urusan pemerintahan, sub digit kedua adalah sub unit organisasi, sub digit ketiga merupakan sub unit organisasi dan sub digit keempat adalah sub nomor agenda. Pada setiap pos-pos biaya dicatat, kemudian digolongkan dan diberi kode sesuai dengan aktivitas atau program kegiatan termasuk biaya rutin dan non rutin sesuai dengan tingkatan manajemen yang bertanggungjawab.

Kode akun sangat berperan penting bagi laporan keuangan. Pengolahan data akuntansi sangat

berguna pada penggunaan kode untuk mencatat, mengklasifikasi, menyimpan dan mengambil data keuangan. Rekening dalam perusahaan atau organisasi jumlah cukup banyak, sehingga sebaiknya diberi kode Mulyadi (2010). Perbandingan hasil penelitian dengan teori akuntansi pertanggungjawaban tentang pengklasifikasian kode akun, maka dikatakan bahwa Kantor Dinas Sosial telah memenuhi syarat akuntansi pertanggungjawaban yaitu pengklasifikasian kode.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdulah (2017) dengan judul Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada CV. Citra Niaga di Baubau yang menjelaskan bahwa kode akun sangat penting dilakukan untuk mempermudah dalam melihat dan mengklasifikasi data keuangan yang tergolong cukup banyak

3. Kesimpulan

Syarat-syarat dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada Kantor Dinas Sosial belum memenuhi semua syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban menurut teori Mulyadi karena belum adanya pemisahan biaya antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Namun Kantor Dinas Sosial sudah memenuhi syarat akuntansi pertanggungjawaban sesuai dengan aturan pemerintahan yang telah ditetapkan.

Pengendalian anggaran sudah tergolong efisien karena tidak terdapat selisih anggaran dan realisasi yang merugikan namun anggaran sepenuhnya masih belum terserap dengan baik ke masyarakat melihat dari beberapa presentasi yang masih rendah.

Ucapan Terimakasih

Penulisan ini tidak terlepas dari partisipasi instansi dan perguruan tinggi dan instansi yang terakut, diantaranya:

1. Ucapan terimakasih kepada Dosen Pembimbing yaitu Bapak Dodi Suyadi, SE. yang telah membimbing dalam penulisan ini.
2. Ucapan Terimakasih kepada Universitas Putra Indonesia "YPTK".

Daftar Rujukan

- Adharawati, A., & Kiswara, E. (2010). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya (Studi Kasus pada PT. Peln Kantor Cabang Makasar) (Doctoral dissertation, Perpustakaan FE UNDIP).

- Ardiani, N. M. S., & Wirasedana, I. W. P. (2013). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Efektivitas Pengendalian Biaya. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(3), 561-573.
- Arfan Ikhsan, Dkk, 2013. Teori Akuntansi. Bandung : Cita Pustaka Media Armila Krisna Warindrani. (2006). Akuntansi Manajemen. Penerbit Graha Ilmu, Jogjakarta.
- Cikiana, W. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Pengendalian Biaya Pada (UD. Basmalah Jarit Candipuro Lumajang).
- Effendi, A., & Bakri, S. (2015). Nilai ekonomi jasa wisata Pulau Tangkil Provinsi Lampung dengan pendekatan metode biaya perjalanan. *Jurnal Sylva Lestari*, 3(3), 71-84.
- Fadhli, M. (2020). Analisis Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada Pt Mitra Beton Mandiri Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Hanum, L. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada PT Tunggal Mitra Plantation MGE-1 Estate (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 6 No. 3, 2023 | 966 Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Horngren, Charles T., et al. 2008. Akuntansi Biaya. Edisi 7. Jakarta: PT INDEKS kelompok GRAMEDIA. Mengko, S. M., & Tirayoh, V. Z. (2015). Implementation of Accountability Accounting with Budget as a Cost Control Tool at PT. Gotrans Logistics Manado Branch. *Scientific Journal of Efficiency*, 15(03), 222-234.
- Merry Veradika Effendy, dkk. 2015. Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Manajemen (PT. Asuransi Jiwa Seraya Malang).
- Fakultans Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Bhayangkara Surabaya Moleong, Lexy J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset Mulyadi. 2010. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Naus, Maria Ewaldina Cherly and Herdi, Henrikus and Salvanos, Yan Yanitza (2019) Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada PT. Pelni Kantor Cabang Maumere. Other thesis, Universitas Nusa Nipa.
- Paat, P. T. Q. (2013). Kajian Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Pengendalian Biaya Operasional Pada BPR. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Pangow, F. F. (2013). Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Salah Satu Dasar
- Penilaian Prestasi Manajemen pada PT. Bank Danamon Indonesia, TBK. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Purwaji, A. (2016). Akuntansi Biaya. Salman, Kautsar Riza. 2016. Akuntansi Biaya. Edisi 2. Jakarta: Indeks.
- Setiyanto, A. I., & Norafyana, N. (2017). Pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya pada industri manufaktur di Batam. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(1), 45-54.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sumarsan. 2010. Sistem Pengendalian Manajemen. Jakarta: PT. Index. Supriyono. 2001. Akuntansi Manajemen. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Suryani, S., Mulyadi, M., & Febrina, R. (2021). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban, Kompetensi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pt. Pulau Samudra Group. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 11-25.
- Soru, Selarista Selviana and Dince, Maria Nona and Goo, Emilianus Eo K. (2018) Penerapan Analisis Penerapan akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada Rmah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers HS di Manado.
- Teruna, A. Y., & Noor, M. Y. (2021). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya. *Cross-border*, 4(2), 780-795.
- Windaratri, V. L. (2017). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya pada Hotel INNA Garuda Yogyakarta. Prodi Akuntansi UPY.